

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 23 TAHUN 2012 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KAWASAN EKOWISATA MANGROVE WONOREJO KOTA SURABAYA

by Dayu Puspita Rani 1111600134

FILE	DAYU_PUSPITA_RANI_1111600134.PDF (199.01K)		
TIME SUBMITTED	14-JUL-2020 11:13PM (UTC+0700)	WORD COUNT	5120
SUBMISSION ID	1357458379	CHARACTER COUNT	35094

1
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 23 TAHUN 2012 TENTANG
KEPARIWISATAAN DI KAWASAN EKOWISATA MANGROVE WONOREJO KOTA
SURABAYA

Dayu Puspita Rani¹, Indah Murti²

Email : dayukarlos@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus
1945, Surabaya

Abstract

Wonorejo Mangrove Ecotourism Area is a tourist place which has beautiful natural and have a role in reducing air pollution in Surabaya City. However within the area there are several problems, such as environmental cleanliness problems and inadequate facilities. The purpose of this research to know the process of Regional Regulation Number 23 of 2012 about Tourism in the Wonorejo Mangrove Ecotourism of Surabaya City and to know obstacle factor and support factor implementation from Regional Regulation Number 23 of 2012. In this research the researcher use George Edward III's policy implementation model. The study contains descriptive research, with the support of qualitative data. Researcher used interviews, observation and documentation to collection data research. The conclusion from the research especially in carrying out tourism obligations in the Wonorejo Mangrove Ecotourism Area it has not been implemented maximally, because there are still many local regulations that are not running optimally or as planned. Not evenly distributed the facilities and infrastructure at the Mangrove Ecotourism and evenly distributed dissemination of information carried out by the government and the management to visitors in maintaining the cleanliness of the mangrove ecotourism destination environment

The support factor implementation from Regional Regulation Number 23 of 2012 about Tourism in the Wonorejo Mangrove Ecotourism of Surabaya City is the role of local government and local communities in developing mangrove ecotourism. The obstacle factor for the Implementation of Regional Regulation Number 23 of 2012 concerning Tourism in the Wonorejo Mangrove Ecotourism Zone in Surabaya. Is not evenly distributed the facilities and infrastructure at the Mangrove Ecotourism. So it is necessary for facility repairs or

renovation for this dimangrove infrastructure must be carried out by the mangrove manager or the relevant agency as well as inadequate communication between stakeholders both agencies, tourism managers and tourists especially in maintaining the cleanliness of the tourist destination environment

Keywords: *Implementation, Regional Regulation, Ecotourism*

Abstrak

Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo ini merupakan wisata yang memiliki daya tarik karena selain sebagai tempat wisata, wisata ini juga berperan dalam mengurangi jumlah polusi udara di Kota Surabaya dan wisata ini memiliki keindahan alam yang asri. Akan tetapi kawasan Mangrove Wonorejo memiliki permasalahan yakni permasalahan kebersihan lingkungan dan fasilitas yang kurang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Peraturan Daerah Nomer 23 tahun 2012 tentang Kepariwisata di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya dan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Nomer 23 tahun 2012 tentang Kepariwisata di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya. Teori yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan George Edward III. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan dukungan data kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 tahun 2012 tentang Kepariwisata khususnya dalam melaksanakan kewajiban kepariwisataan di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo belum terlaksana secara maksimal, karena masih banyak peraturan Daerah yang tidak berjalan optimal atau sebagaimana yang direncanakan. Mengingat masih belum meratanya fasilitas sarana prasarana di Ekowisata Mangrove dan belum meratanya sosialisasi yang dilakukan pihak-pihak Dinas maupun pengelola kepada pengunjung dalam menjaga kebersihan lingkungan destinasi ekowisata mangrove.

Faktor pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomer 23 tahun 2012 tentang Kepariwisata di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya adalah Peran Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal dalam mengembangkan ekowisata mangrove. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomer 23 tahun 2012

tentang Kepariwisata di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya adalah belum meratanya fasilitas sarana prasarana di Ekowisata Mangrove sehingga perlunya perbaikan fasilitas atau renovasi ulang untuk prasarana dimangrove ini yang harus dilakukan oleh pihak pengelola mangrove atau instansi yang bersangkutan serta Komunikasi yang kurang maksimal antar stakeholders baik instansi, pengelola wisata dan wisatawan khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan destinasi wisata

Kata Kunci :Implementasi,Peraturan Daerah ,Ekowisata

1. Pendahuluan

Pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan pembangunan nasional yang ditujukan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antara daerah di Indonesia. Cara yang dapat digunakan untuk pembangunan suatu daerah adalah dengan mengembangkan pariwisata yang ada di daerah tersebut . Sektor pariwisata dapat diandalkan sebagai peningkat kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah maupun nasional karena sector pariwisata merupakan sektor yang memiliki daya tarik yang tinggi . Maka dari itu dalam pengoptimalan pembangunan nasional perlu dilakukan upaya pengembangan sektor-sektor yang dianggap potensial dan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian, termasuk pengembangan sektor pariwisata. Pemerintah perlu mengembangkan sektor wisata berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya lokal yang ada. Pariwisata berkelanjutan merupakan pariwisata yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat. (Evi Rusdiana, Susi Hardjati , 2019)

Bentuk dari adanya pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan ekowisata. Ekonomi Pariwisata (Ekowisata) juga menjadi sektor yang penting dalam peningkatan perekonomian. Ekonomi Pariwisata ialah kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam dalam bentuk wisata, bertujuan untuk pendidikan, penelitian, dan pelestarian lingkungan hidup, serta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. juga menjadi sektor yang penting dalam peningkatan perekonomian. Mengingat bahwa ekowisata merupakan komponen yang sangat penting saat ini, tentu pemerintah harus memberikan perhatian dan mengembangkan potensi wisata yang ada disetiap daerah. Salah satunya adalah Kota Surabaya yang memiliki destinasi berbasis keindahan alam yang dimilikinya. Kota Surabaya yang berada di pesisir pantai timur pulau Jawa mempunyai beberapa kawasan mangrove yang tersebar di bagian utara. Wilayah ini sering disebut dengan kawasan pantai utara (pantura) Surabaya dan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya). Wilayah tersebut mencakup empat kecamatan,

yaitu Gunung Anyar, Sukolilo, Rungkut dan Mulyorejo. Empat wilayah tersebut lebih populer disebut dengan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya). Ekosistem mangrove di Pamurbaya merupakan salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus, karena Mangrove Wonorejo dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Kawasan ekowisata mangrove di Wonorejo memiliki karakter unik dan khas pada ekosistem pantai. Ekosistem tersebut merupakan perpaduan antara kehidupan darat dan air.

Dengan perkembangan ekonomi pariwisata tersebut Pemerintah Kota Surabaya memiliki kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata²an. Tujuan dari adanya kebijakan kepariwisataan ini di buat guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan daerah dan mengangkat citra diri Kota Surabaya terutama di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo.

Ekowisata mangrove salah satu wisata yang menjadi ikon warga Surabaya bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Perkembangan Kawasan ekowisata Mangrove Wonorejo ini memiliki berbagai macam flora dan fauna. Potensi yang dimiliki ini mendapat dukungan pemerintah, berupa dukungan modal, dukungan moral dan dukungan partisipasi, memungkinkan Ekowisata Mangrove Wonorejo cukup untuk dikembangkan. Kepengurusan Lembaga Swadaya Masyarakat sudah terbentuk dan mendapat dukungan pemerintah setempat yang berkedudukan sebagai Pelindung, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Surabaya dan Dinas Pariwisata berkedudukan sebagai Pendukung. Ekowisata Mangrove Wonorejo ini juga dilengkapi dengan berbagai jenis fasilitas penunjang seperti perahu, Musholla, gazebo, sentra PKL makanan dan minuman, serta jogging track panjang yang terbuat dari anyaman bambu, yang menghubungkan berbagai titik obyek.

Dilihat dari fasilitas jogging track atau jembatan bambu mengalami permasalahan yakni untuk penghalangnya sebagian tidak ada dan sudah ada penghalang jembatan di sisi kanan dan sisi kiri, sehingga dapat pula membahayakan keselamatan pengunjung atau wisatawan yang berkunjung dan

mengganggu kenyamanan karena bisa terjatuh saat berjogging ataupun sedang mengelilingi pohon Mangrove. Hal ini tidak sejalan dengan Kebijakan yang dikemukakan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 pada pasal 21 ayat a,b,c yakni Pemerintah daerah berkewajiban dalam menyelenggarakan kepariwisataan.

Dari ketiga pasal tersebut masih ¹terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, dan masih belum memberikan hasil yang diharapkan. Supaya Tujuan Peraturan daerah tersebut berjalan dengan baik, maka perlu adanya upaya dari pelaksana kebijakan dalam penjagaan, perawatan, dan pengelolaan yang baik. Pengembangan sarana dan prasarana juga perlu mendapat perhatian dari pihak pengelola demi kenyamanan pengunjung dan tidak merusak ekosistem mangrove. Dari kondisi inilah maka penulis ingin mendalami lebih lanjut ³tentang Implementasi Peraturan Daerah No 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataaan di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataaan Di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya?
2. Apa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah No 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataaan Di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya?

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) ³Untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah No 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataaan Di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya
- 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Daerah No 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataaan Di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya

2. Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya terutama pada pasal 21 yakni kewajiban Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kepariwisataan. Penelitian ini berfokus pada Teori Implementasi yang digunakan adalah George Edward III. Implementasi akan dilihat melalui empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun indikator dari keempat indikator tersebut :

- Komunikasi
 - Komunikasi pelaksana kebijakan yaitu dinas dengan pengelola mangrove terkait terlaksananya kewajiban pariwisata dalam peraturan daerah
 - Komunikasi atau bersosialisasi antara Pengelola Mangrove dengan Wisatawan mengenai peraturan daerah agar memudahkan para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan
- Sumber Daya
 - Sumber Daya Fasilitas yaitu fasilitas yang ada di Mangrove
 - Sumber Daya Manusia yaitu pelaksana kebijakan yang ada di Mangrove
 - Sumber Daya Informasi yaitu informasi pelaksanaan kepariwisataan
- Disposisi

Sikap pelaksana dalam menyelenggarakan kewajiban kepariwisataan yang ada di Mangrove
- Struktur Birokrasi

kejelasan standar prosedur operasional dan kejelasan pembagian tanggung jawab bagi pelaksana kebijakan

Sedangkan Lokus dari penelitian ini adalah di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya. Peneliti melakukan Observasi, Wawancara, Dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya

Sumber data dalam penelitian ini ada dua data yakni data primer dan data sekunder. Pertama yaitu sumber data primer yakni Pegawai Ekowisata Mangrove, Pengunjung dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung sebagai sumber data primer yang sangat diperlukan dalam penelitian ini. Kedua yaitu sumber data sekunder yang menjadi sumber data sekunder adalah Pengelola Ekowisata Mangrove Wonorejo.

3. Hasil

Peraturan Daerah ialah suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah, gubernur, walikota. Pemerintah Kota Surabaya memiliki kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata². Tujuan dari adanya kebijakan kepariwisataan ini di buat guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan daerah dan mengangkat citra diri Kota Surabaya terutama di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo³. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 pada pasal 21 yakni dalam menyelenggarakan kewajiban kepariwisataan Pemerintah daerah berkewajiban:

a) Menyediakan & memberikan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan.

b) Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum.

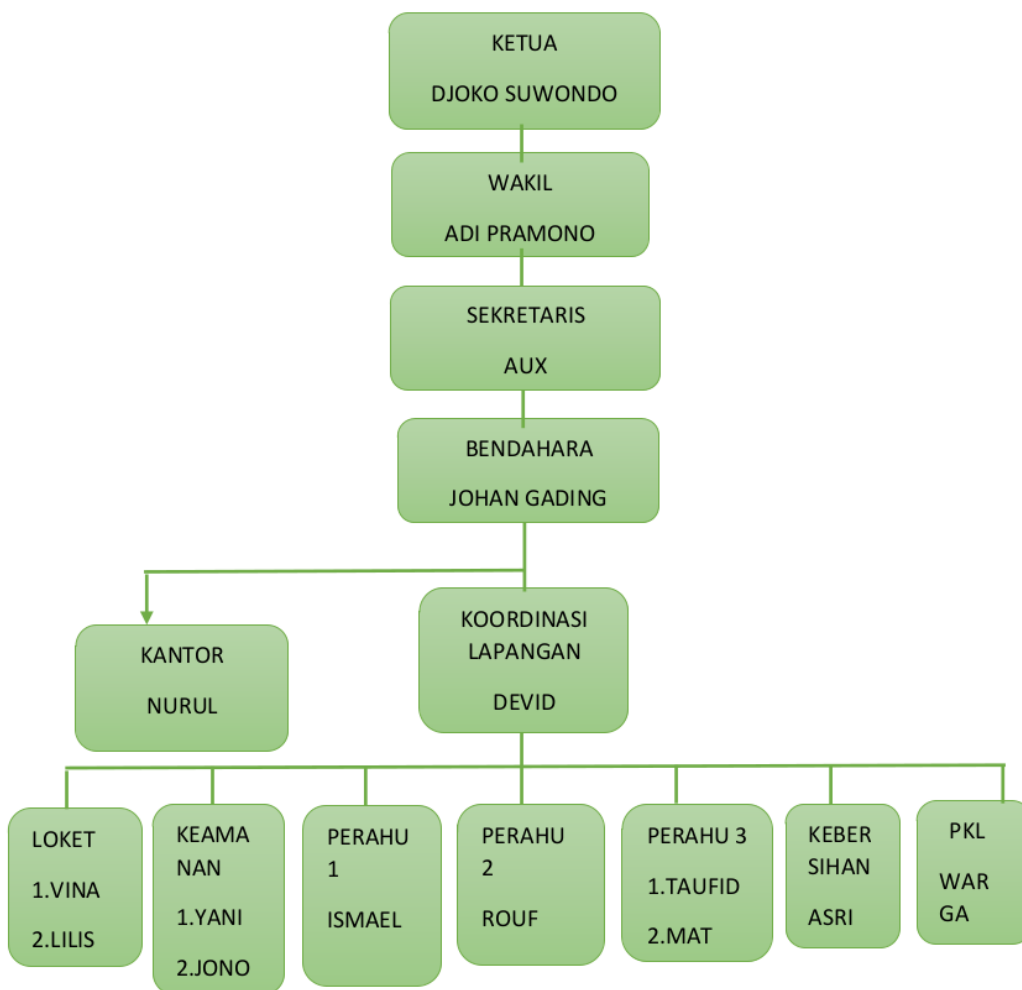
c) Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.

Ekowisata Mangrove Wonorejo dimanfaatkan sebagai wisata edukasi, dalam bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan melestarikan lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Ekowisata Mangrove sekarang ini dikelola Lembaga Swadaya Masyarakat yakni Lembaga Ketahanan Masyarakat Keluahan (LKMK) dan

didukung oleh dua instansi yang berbeda yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ekowisata Mangrove Wonorejo ini juga dilengkapi dengan berbagai jenis fasilitas penunjang seperti Dermaga, Spot foto, Rest area, Musholla, Gazebo, Toilet, Sentra Kuliner, Area Parkir serta Jogging track. Adapun Visi, Misi, Tujuan Serta Potensi dari pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove sebagai berikut:

- a. Visi : mengembalikan hutan dari penebangan liar, dan menyelamatkan lingkungan dari abrasi laut.
- b. Misi : sebagai pembelajaran akan lingkungan, pengembangan masyarakat
- c. Tujuan Ekowisata Mangrove Wonorejo :
 - Menyelamatkan hutan dari abrasi laut
 - Meningkatkan minat belajar akan lingkungan
 - Membantu program pemerintah khususnya Jawa Timur, karena Ekowisata mangrove Wonorejo akan di jadikan percontohan mangrove center se Jawa Timur
 - Memberikan lapangan pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat
- d. Potensi Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo
 - Potensi Keanekaragaman Ekowisata Mangrove
Ekosistem mangrove yang ada di Wonorejo dapat terbilang cukup bervariasi, atau dalam kata lain, dengan adanya keberagaman ekosistem mangrove akan mendatangkan berbagai jenis flora dan fauna sehingga tidak hanya jenis mangrove yang bervariasi namun juga flora dan fauna yang tersedia. Di kawasan ekowisata mangrove ini terdapat lebih dari 83 spesies burung eksotik dan tanaman bakau dan non bakau yang tumbuh di ekowisata mangrove ini.
 - Potensi Pengembangan Kawasan
Potensi pengembangan dilihat dari pandangan segi sosial, kawasan Ekosistem Mangrove Wonorejo sampai saat ini telah dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat yang mencakup antara petambak, nelayan serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove. Dimana dari ketiga pihak tersebut saling bekerjasama dalam upaya mengelola dan menjaga keseimbangan ekosistem alam. Kemudian dari segi ekonomi keberadaan Ekowisata Mangrove Wonorejo dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar serta biaya retribusi yang harus dibayar ketika berkunjung di Ekowisata ini sebenarnya digunakan untuk upaya pengelolaan kawasan. Sedangkan segi edukasi kawasan mangrove Wonorejo merupakan salah satu media belajar yang sekaligus tempat rekreasi para pengunjung. Kalau dilihat dari segi wisata dimana pada Ekowisata Mangrove Wonorejo ini juga dilengkapi dengan berbagai jenis fasilitas penunjang seperti Dermaga ,Musholla,gazebo, sentra kuliner makanan dan minuman, toilet serta jogging track. Adapun Profil Kepengurusan Ekowisata Mangrove Wonorejo sebagai berikut:



Gambar 3 Struktural Mangrove Wonorejo

Sumber : Pihak pengelola Mangrove,2020

Disamping itu, Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo ini merupakan wisata yang memiliki daya tarik karena selain sebagai tempat wisata, wisata ini juga berperan dalam mengurangi jumlah polusi udara di Kota Surabaya dan wisata ini memiliki keindahan alam yang asri. Karena hal-hal tersebutlah wisata ini kian menjadi wisata yang ramai di kunjungi oleh wisatawan. Wisatawan yang datang berkunjung tidak hanya dari Kota Surabaya saja, namun banyak dari luar daerah bahkan luar negeri. Hal itu membuat para stakeholder terkait harus meningkatkan pelayanannya dan dapat memfasilitasi para wisatawan menjadi lebih baik supaya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan untuk kedepannya, serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Adapun tabel pengunjung wisatawan mangrove sebagai berikut :

Tabel Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya tahun 2017-2020

BULAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018			Tahun 2019				TAHUN 2020		
	Dws	Ank	Wsm	Dws	Ank	Wsm	Dws	Ank	Wsm	Dws	Ank	Wsm
Jan	2691	1072	36	1980	544	24	3036	859	79	3921	917	39
Feb	1268	336	26	1308	398	19	2194	547	20	1915	544	7
Mar	14999	393	31	1602	490	12	2335	586	15	1344	365	0
Apr	1970	636	67	1724	514	10	2207	690	78	0	0	0
Mei	1358	432	27	1601	413	5	1172	226	18	0	0	0
Jun	1656	480	12	2870	833	23	4608	1303	49			
Jul	2040	511	37	2425	775	26	3320	1395	24			
Agt	1388	308	12	1853	417	40	2161	507	28			
Sep	1347	442	8	2517	629	21	2770	671	10			
Okt	1532	547	13	1719	425	19	1616	596	25			
Nov	818	306	3	2061	533	17	2481	618	45			
Des	2954	902	40	4125	998	183	5236	1388	78			
	20521	6365	312	25785	6969	399	33136	9386	469	7180	1826	46

Sumber : Pihak Pengelola Mangrove

Keterangan :

*Dws : Dewasa

*Ank : Anak

*Wsm : Wisata Mancanegara

Berdasarkan data Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung wisata Mangrove Wonorejo Surabaya setiap tahunnya mengalami peningkatan

jumlah pengunjung. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung sebesar 27.198 pengunjung, pada tahun 2018 jumlah pengunjung 33.153 pengunjung, pada tahun 2019 jumlah keseluruhan pengunjung mencapai 42.991 pengunjung dan jumlah keseluruhan pada tahun 2020 mencapai 9.052 pengunjung. Jika dilihat pada tahun 2017 tidak terlalu besar di bandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Sedangkan pada tahun 2018 hingga tahun 2019 jumlah pengunjung mengalami peningkatan yang pesat di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2020 ini jumlah pengunjung ekowisata mangrove ini mengalami penurunan sekitar 80-90%, karena adanya wabah covid-19 yang melanda dunia ini

4. Pembahasan

Peneliti menggunakan teori George Edward III, yang penjelasannya pada masing-masing sub bab diantaranya membahas tentang ruang lingkup komunikasi, sumber daya, disposisi, struktural birokrasi. Untuk menganalisis kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Surabaya tentang kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kepariwisataan yang diterapkan di Ekowisata Mangrove Wonorejo ini supaya memfasilitasi sarana dan prasarana, melestarikan lingkungan dan menjaga daya tarik destinasi pariwisata, dan keamanan kenyamanan serta keselamatan wisatawan, serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik di kawasan ekowisata mangrove wonorejo ini.

Adapun deskripsi temuan dan analisa akan dipaparkan dalam bagian berikut :

1. Komunikasi

Lingkup komunikasi disini berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang membuat dan melaksanakan kebijakan tersebut, baik antar instansi pemerintahan dengan lembaga lain yaitu para pengelola tempat wisata maupun masyarakat yang ada di sekitar kawasan wisata tersebut. Dengan komunikasi dan pemaksimalan **implementasi potensi pariwisata sebagai penggerak, pemerataan dan peningkatan pembangunan**. Dinas terkait, dalam hal ini pemerintah kota Surabaya kurang aktif dalam melakukan sosialisai dan edukasi tentang

pengimplementasian kebijakan pariwisata. Dampak kurang maksimalnya sosialisasi dan edukasi adalah pengimplementasi kebijakan berjalan kurang baik, selain itu komunikasi juga memegang peranan penting dalam pelestarian destinasi ekowisata mangrove ini untuk meraih prospek dan peluang di bidang ekonomi berbasis pariwisata karena itu pemerintah Surabaya melalui Dinas terkait diharapkan dapat memfasilitasi atraksi wisata, menjaga kebersihan lingkungan agar ekosistem yang ada dimangrove bertumbuh dengan baik, meningkatkan pendapatan masyarakat serta membantu membuka peluang lapangan pekerjaan sekitar dengan membuka pelatihan industri kecil atau usaha kecil masyarakat. Sifat komunikasi pemerintah sebaiknya integratif artinya baik pemerintah sebagai komunikator maupun masyarakat penerima informasi berada pada posisi yang sama sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan Perda pasal 21 ayat C tentang “Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan daya tarik wisata” pihak terkait dalam menjaga kebersihan masih belum optimal. sehingga kordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan pariwisata kurang dipahami oleh pelaksana kebijakan yang lain. Semisal pihak pengelola sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut dengan mengambil sampah tersebut setiap harinya dan usaha dinas dalam menghimbau pengunjung dengan adanya banner akan sadar lingkungan akan tetapi kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk peduli dengan kebersihan lingkungan di kawasan ekowisata mangrove. Namun usaha pelaksana dalam berkomunikasi dengan masyarakat masih kurang optimal. Kegiatan sosialisasi tentang kepedulian lingkungan dan aktif dalam menjaga kebersihan dan merupakan tindak nyata dalam upaya mengurangi sampah plastik dan upaya penyelamatan Ekowisata Mangrove wonorejo akan tetapi masyarakat belum sadar pentingnya

hal tersebut dilihat dari realita ekowisata mangrove masih adanya sampah yang berserakan di area mangrove.

2. Sumber Daya

- a) Yang dimaksudkan sumber daya manusia disini mencakup tersedianya tenaga atau staf dalam mengimplemntasikan Peraturan Darah Nomor 23 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kepariwisataa khususnya di kawasan Mangrove Wonorejo. Staf yang akan menjalankan atau melaksanakan kebijakan tersebut, staf yang melakukan pengawasan¹ maupun staf yang akan mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada pelaku usaha pariwisata yang ada di Ekowisata Mangrove Wonorejo ini. Untuk kepengurusan mangrove wonorejo sendiri dalam pembagian tugas dan kewajiban akan pengelolaan mangrove ini sudah sesuai dengan kebijakan perda ini agar berjalan dengan baik, dengan tersedianya jumlah tenaga kerja atau pegawai (staf) yang mencukupi, maka diharapkan kedepannya pelaksanaan kebijakan semakain cepat dalam kegiatan serta program-program kerja yang dilakukan juga dapat terlaksana dengan semakin baik
- b) Sumber Daya Fasilitas dalam hal ini adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja dalam menunjang Implementasi Perda Nomor 23 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kepariwisataa khususnya di kawasan Mangrove Wonorejo.
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga dapat menunjang Implementasi Perda Nomor 23 tahun 2012 pasal 21 ayat B “memfasilitasi sarana dan prasarana usaha pariwisata” di kawasan Mangrove Wonorejo. Fasilitas sarana dan prasarana di Ekowisata Mangrove ini dilengkapi dengan berbagai jenis fasilitas penunjang seperti Dermaga, Spot foto , Rest

area, Musholla, Gazebo, Toilet, Sentra Kuliner, Area Parkir serta Jogging track panjang yang terbuat dari anyaman bambu, yang menghubungkan berbagai titik obyek. Atraksi wisata yang dimiliki oleh Ekowisata Mangrove Wonorejo semisal adanya wisata perahu dan jogging track. Wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas di Ekowisata Mangrove Wonorejo, seperti berjalan mengelilingi wisata, duduk santai, berfoto-foto dengan latar belakang pemandangan hutan mangrove yang indah, wisatawan juga dapat menikmati indahnya hutan mangrove di pinggir pantai dengan menaiki perahu. Akan tetapi dengan tersedianya fasilitas tersebut masih perlu adanya perbaikan atau renovasi ulang karena sebagian prasarana masih ada yang belum merata dan kurang memadai terutama bagian pantai mangrovenya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan dana untuk mendukung ketercapaian keberhasilan implementasi kebijakan peraturan daerah ini. Untuk fasilitas jogging track atau jembatan bambu bagian penghalangnya tidak ada dan sudah ada penghalang jembatan di sisi kanan dan sisi kiri, sehingga dapat pula membahayakan keselamatan pengunjung atau wisatawan yang berkunjung dan mengganggu kenyamanan karena bisa terjatuh saat berjogging ataupun sedang mengelilingi pohon Mangrove. Perbaikan fasilitas ini dipengaruhi oleh ketersediaan dana untuk mendukung ketercapaian keberhasilan implementasi kebijakan peraturan daerah ini. Hal ini sangat berpotensi menghambat keberhasilan implementasi kebijakan peraturan Daerah no 23 terutama pada pasal 21 tentang kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kepariwisataan.

c) Wewenang

Ekowisata Mangrove ini dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yakni Lembaga Ketahanan Masyarakat Keluahan

(LKMK) dan didukung oleh dua instansi yang berbeda yakni Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pihak pengelola ekowisata Mangrove Wonorejo ini memiliki pedoman dan dasar dalam mengembangkan serta melestarikan wisata mangrove wonorejo. Kepengurusan ekowisata mangrove wonorejo ini di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dibawah lindungan kecamatan dan kelurahan wonorejo, dan dibawah keamanan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) rungkut. Adapun wewenang stakeholder dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo antara lain sebagai berikut :

- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya berkewenangan untuk menjaga kelestarian lingkungan Ekowisata Mangrove Wonorejo dan sebagai fasilitator untuk pembibitan, penanaman, dan perawatan mangrove
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya berkewenangan untuk melakukan promosi objek wisata
- Kelurahan Wonorejo berkewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wisata
- Lembaga Swadaya Masyarakat berkewenangan untuk mengelola jogging track dan memberikan edukasi kepada pengunjung tentang mangrove
- Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) berkewenangan untuk pengamanan lokasi wisata dan menjaga ketertiban lingkungan

d) Informasi

Dalam melaksanakan kewajiban ³ sesuai dengan Peraturan Daerah no 23 Tahun 2012 pasal 21 ayat A “Menyediakan dan memberikan informasi kepariwisataan” baik Dinas Ketahanan Pangan Pertanian maupun Pengelola Mangrove sudah memberikan informasi, sosialisasi, dan mempublikasikan daya tarik ekowisata mangrove wonorejo ini sudah berjalan dengan optimal. Dengan adanya sosial media dijamin sekarang pihak pengelola mangrove memanfaatkan hal tersebut dengan melalui sosial media yakni selalu memperbaharui berita di website yang telah ¹ ada, dan menyediakan media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat semisal dengan adanya instragram,facebook khusus untuk akun ekowisata mangrove wonorejo sendiri. Karena hal-hal tersebutlah wisata ini kian menjadi wisata yang ramai di kunjungi oleh wisatawan.Terbukti dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung wisata Mangrove Wonorejo Surabaya setiap tahunnya. Hal itu membuat para stakeholder terkait harus meningkatkan pelayanannya dan dapat memfasilitasi para wisatawan menjadi lebih baik supaya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan untuk kedepannya, serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa dinas maupun pengelola ekowisata mangrove untuk sikap pelaksana dalam menjalankan kewajiban di perda ini, pihak terkait sudah saling bekerjasama intuk merealisasikan apa yang ada didalam perda tersebut, melaksanakan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan ekowisata mangrove ini sudah berusaha sebaik

1 mungkin. Baik sosialisasi, maupun informasi lewat media serta sudah mengirimkan personil turun kelapangan untuk mengimplementasikan perda tersebut. Pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan yakni pengelola ekowisata mangrove wonorejo dan pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara penuh dalam kegiatan ekowisata baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangannya. Semisal untuk parkir mengatur ketertiban kendaraan pengunjung dan bertanggungjawab terhadap keamanan dalam kegiatan ekowisata mangrove wonorejo. Petugas jogging track bertanggung jawab dalam mengelola jogging track Dinas Pertanian. Petugas jogging track juga bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan wisatawan, sehingga tidak melakukan perusakan terhadap ekosistem mangrove, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak melakukan tindakan asusila. Petugas toilet bertanggung jawab atas kebersihan toilet. Staf MIC (Mangrove Information Center) sekaligus sebagai bagian hubungan masyarakat ekowisata bertanggung jawab sebagai petugas administrasi mewakili Dinas Pertanian di lokasi MIC. Adapula program dari pelaksana dalam merealisasikan kewajiban didalam perda yakni 1 untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi 1 terbukanya kesempatan yang sama yaitu Pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial ini diukur melalui kualifikasi diri dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekowisata mangrove. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut diperoleh dari adanya pelatihan (pendidikan non formal) yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut. Pelatihan untuk pengolahan produk dari mangrove. Pengolahan produk mangrove adalah salah keahlian yang masih jarang dimiliki. Contoh produk olahan mangrove adalah sirup dan dodol Bogem (*Sonneratia caseolaris*), tepung Tanjung (*Bruguiera gymnorhiza*) dan lain sebagainya. Berdasarkan dari hasil wawancara informan yang telah mengikuti pelatihan ini adalah semua petani mangrove, karena menjadi bagian dari pelatihan dan sosialisasi

tentang mangrove. PKL mendapatkan pelatihan pengolahan produk mangrove untuk meningkatkan keahlian mereka dan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Menurut hasil wawancara dengan pengelola mangrove, ¹ Mengenai adanya SOP menjadi acuan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan bidang dan penetapannya tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mereka memiliki standar kerja sesuai dengan perencanaan dari perencanaan awal sampai perencanaan akhir, dan juga saling bekerja sama dalam menjaga dan melestarikan ekowisata mangrove wonorejo ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan beberapa pihak atau pegawai di Dinas Pertanian bahwa pembagian tugas kerjanya sudah sesuai dengan bidang dan masing-masing keahlian mereka dan juga sesuai dengan pendidikan yang mereka miliki.

Salah satu Faktor Penghambat yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Daerah No 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya ialah Faktor penghambat antara lain:

a) Sumber Daya Fasilitas Ekowisata Mangrove, perlu adanya perbaikan fasilitas atau renovasi ulang untuk prasarana dimangrove ini yang harus dilakukan oleh pihak pengelola mangrove atau instansi yang bersangkutan. ¹ Hal ini sangat berpotensi menghambat keberhasilan implmentasi kebijakan peraturan Daerah no 23 terutama pada pasal 21 tentang kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kepariwisataan. Dan juga perlunya ketersediaan dana untuk

mendukung ketercapaian keberhasilan implementasi kebijakan perda ini.

b) Komunikasi yang kurang maksimal antar *stakeholders* baik instansi, pengelola wisata dan wisatawan khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan destinasi wisata untuk mengatasi permasalahan sampah, serta minimnya kesadaran wisatawan agar mau menjaga ekowisata mangrove ini dengan membuang sampah pada tempatnya, karena sampah dapat menghambat pertumbuhan daripada ekosistem mangrove wonorejo. Dan juga kurang adanya saksi tegas oleh pengelola mangrove hanya ada himbauan saja.

- Faktor Pendukung :

1. Disposisi

Sikap pelaksana dalam menjalankan kewajiban di perda ini baik pembuat dan pelaksana kebijakan sudah saling bekerjasama untuk merealisasikan apa yang ada didalam perda tersebut, melaksanakan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan ekowisata mangrove ini sudah berusaha sebaik mungkin. Baik sosialisasi, maupun informasi lewat media serta sudah mengirimkan personil turun kelapangan untuk mengimplementasikan perda tersebut. Pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan yakni pengelola ekowisata mangrove wonorejo dan pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara penuh dalam kegiatan ekowisata baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangannya. Adapula program dari pelaksana dalam merealisasikan kewajiban didalam perda yakni untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama yaitu Pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial ini diukur

melalui kualifikasi diri dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekowisata mangrove. UMKM juga mendapatkan pelatihan pengolahan produk mangrove untuk meningkatkan keahlian mereka dan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Pelatihan untuk pengolahan produk dari mangrove semisal adanya sirup dan dodol Bogem, tepung Tanjung dan lain sebagainya.

2. Struktur Birokrasi

Dalam struktur birokrasi pelaksana sudah membuat SOP sebagai pelaksanaan Perda no 23 tahun 2012. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini digunakan sebagai standar kerja untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum dan tidak terduga yang ada diberbagai sektor publik. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat melakukan pekerjaannya secara optimal dan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. SOP juga dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pegawai dalam organisasi yang kompleks sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas dan memiliki kesamaan dalam penerapan peraturan. Standar operasional juga menjadi tolok ukur pegawai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan bidang dan penetapannya. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pembagian tanggung jawab kerja kepada pihak yang terkait ini adalah agar memudahkan dalam Implementasi kebijakan Nomor 23 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kepariwisataannya khususnya dalam melaksanakan kewajiban kepariwisataan di kawasan mangrove wonorejo ini, sehingga perda tersebut bisa berjalan dengan baik, selain itu agar terciptanya kerjasama yang baik antara pihak yang terlibat dalam Implementasi suatu

kebijakan. Pemerintah menyusun program penyuluhan tentang lingkungan dan ekosistem mangrove, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanfaatan mangrove, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat setempat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah no 23 tahun 2012 tentang Kepariwisata terutama kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kepariwisataan pada kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya kurang optimal dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

a) Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Perda pasal 21 ayat C tentang “Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan daya tarik wisata” Pemerintah Surabaya melalui dinas terkait dalam menjaga kebersihan masih belum optimal.

b) Sumber Daya dalam melaksanakan kewajiban ³ sesuai dengan Peraturan Daerah no 23 Tahun 2012 pasal 21 ayat A “Menyediakan dan memberikan informasi kepariwisataan” baik Dinas maupun Pengelola Mangrove memberikan informasi dan mempublikasikan daya tarik ekowisata mangrove wonorejo ini sudah berjalan dengan optimal. Akan tetapi untuk Perda Nomor 23 tahun 2012 pasal 21 ayat B “memfasilitasi sarana dan prasarana usaha pariwisata” di kawasan Mangrove Wonorejo dalam menyediakan sarana dan prasarana sudah terlaksanakan, namun dengan tersedianya fasilitas tersebut masih perlu adanya perbaikan atau renovasi ulang karena sebagian prasarana masih ada yang belum merata dan kurang memadai terutama bagian pantai mangrovenya.

c) Sikap pelaksana dalam menjalankan kewajiban di perda ini, pihak terkait sudah optimal dan saling bekerjasama untuk merealisasikan apa yang ada didalam perda tersebut, melaksanakan kewajibannya untuk

menjaga dan melestarikan ekowisata mangrove ini sudah berusaha se-optimal mungkin.

d) Struktur birokrasi ¹ diketahui bahwa memang sudah adanya SOP sebagai pelaksanaan Perda no 23 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kepariwisataannya khususnya dalam melaksanakan kewajiban kepariwisataan di kawasan mangrove wonorejo ini dan dalam pelaksanaannya sudah optimal.

Adapun Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Implementasi Peraturan Daerah No 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataannya Di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya antara lain :

- Faktor penghambat :

- a) Sumber Daya Fasilitas Ekowisata Mangrove, perlu adanya perbaikan fasilitas atau renovasi ulang untuk prasarana dimangrove ini yang harus dilakukan oleh pihak pengelola mangrove atau instansi yang bersangkutan.

- b) Komunikasi yang kurang maksimal antar *stakeholders* baik instansi, pengelola wisata dan wisatawan khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan destinasi wisata untuk mengatasi permasalahan sampah, serta minimnya kesadaran wisatawan agar mau menjaga ekowisata mangrove ini dengan membuang sampah pada tempatnya.

- Faktor Pendukung :

1. Disposisi dalam menjalankan kewajiban di perda ini baik pembuat dan pelaksana kebijakan sudah saling bekerjasama untuk merealisasikan apa yang ada didalam perda tersebut, melaksanakan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan ekowisata mangrove ini sudah berusaha sebaik mungkin.

2. Struktur Birokrasi, ¹ Mengenai adanya SOP menjadi acuan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan

bidang dan penetapannya. Pemerintah menyusun program penyuluhan tentang lingkungan dan ekosistem mangrove, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanfaatan mangrove, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat setempat.

6. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, beberapa saran yang diajukan untuk meningkatkan keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah no 23 tahun 2012 tentang Kepariwisata terutama kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kepariwisataan pada kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya sebagai berikut:

1. ⁴ Sifat komunikasi pemerintah sebaiknya integratif artinya baik pemerintah sebagai komunikator maupun masyarakat penerima informasi berada pada posisi yang sama sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.
2. Perlu adanya perawatan dan pengawasan dari pihak pengelola mangrove maupun instansi yang bersangkutan
3. Optimalisasi kerjasama antar stakeholders baik instansi, pengelola wisata dan wisatawan khususnya dalam Melestarikan Daya Tarik Ekowisata Mangrove Wonorejo sebagai ekowisata yang terkelola dan diminati wisatawan
4. Untuk meningkatkan aksesibilitas tempat destinasi wisata terutama Ekowisata Mangrove Wonorejo maka diperlukan pembenahan ulang (perbaikan dan pemeliharaan) sarana dan prasarana harus diprioritaskan penganggarannya.

Daftar Pustaka

Bazeley, P. (2013). *Qualitative Data Analysis Practical Strategies*. California: SAGE.

¹
Nugroho, Riant. D. . (2003). *Kebijakan publik formulasi implementasi dan formulasi* .
Jakarta: PT Elex Media komputindo.

Evi Rusdiana, Susi Hardjati . (2019). Pengembangan Destinasi Wisata Mangrove
Wonorejo Di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *Public Administration Journal*

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Daerah Kota Surabaya No 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 23 TAHUN 2012 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KAWASAN EKOWISATA MANGROVE WONOREJO KOTA SURABAYA

ORIGINALITY REPORT

% **10**
SIMILARITY INDEX

% **12**
INTERNET SOURCES

% **2**
PUBLICATIONS

% **4**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 jurnal.umrah.ac.id %**5**
Internet Source

2 jdih.surabaya.go.id %**2**
Internet Source

3 eprints.upnjatim.ac.id %**2**
Internet Source

4 media.neliti.com %**2**
Internet Source

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES < 2%